

Kepemimpinan pemerintahan daerah dan resistensi warga masyarakat terhadap implementasi kebijakan pembangunan (kasus pembangunan unit pengolahan sampah di Kota Depok) = Local government leadership and the citizen resistance in the implementation of development policy (case study of waste processing units development in Depok Municipality)

Setiawan Eko Nugroho, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20341912&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini membahas mengenai kepemimpinan pemerintahan daerah dalam implementasi kebijakan pembangunan. Adapun kasus yang diteliti adalah mengenai pembangunan Unit Pengolahan Sampah di Kota Depok di tahun 2008. Program pengadaan sarana dan prasarana di bidang persampahan ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan lingkungan hidup di Kota Depok, khususnya keterbatasan lahan pembuangan sampah. Sehingga pada skala kawasan, dibangunlah 20 unit pengolahan sampah (UPS). Selain itu juga, melihat bagaimana keterkaitan kepemimpinan pemerintahan daerah terhadap resistensi warga terkait dengan implementasi tersebut. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menghasilkan kesimpulan bahwa kepemimpinan pemerintahan daerah di Kota Depok belum optimal dalam mengimplementasikan pembangunan UPS. Kemudian, kaitan antara kepemimpinan pemerintahan daerah dengan resistensi warga masyarakat terjadi terutama dalam aspek politik.

The focus of this study is to explore the leadership in the implementation of government's policy. The case being studied is the policy development in the Waste Processing Unit (UPS) in Depok Municipality year 2008. The waste program facilities are intended to address the problem of limited waste disposal area. This study is designed to find out the leadership of local government and also the regent legislative members play their role in the implementation of the policy that they have decided and legalized. In addition, it is also aimed to describe how the leadership's role in the citizen resistance cases. By using qualitative research approach, it is concluded that the local government leadership in Depok municipality was not optimal in playing its role as well as in facing the citizen resistance.